



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023 BNN PROVINSI JAWA BARAT



@infobnn_prov_jabar BNN PROVINSI JAWA BARAT @BNNPROVJABAR
✉ bnnp_jabar@bnn.go.id INFOBNNPROVJABAR jabar.bnn.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai Satuan Kerja Vertikal dari BNN RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di bidang P4GN berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024. Renstra BNN sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program P4GN.

Laporan ini menyajikan hasil capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat selama satu tahun, atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan tugas bidang P4GN. Laporan ini dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mengatur, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat selaku penyelenggara negara di bidang P4GN, wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 dengan 15 (Lima Belas) sasaran kegiatan, dan 21 (Dua Puluh Satu) indikator kinerja kegiatan yang

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh *Stakeholder* di Provinsi Jawa Barat, secara umum berbagai target dapat berhasil dicapai dengan cukup baik.

Untuk pelaporan realisasi implementasi Inpres 2 Tahun 2020 ke BNN RI, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat telah melaporkan yang berbasis Web dengan laman <https://inpresp4gn.bnn.go.id/> dan anggaran dengan laman [monevgar.bnn.go.id.](https://monevgar.bnn.go.id/)

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, saya berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja secara keseluruhan.

Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua Amin.



DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
RINGKASAN LAPORAN KERJA	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis dan Rencana Program kerja	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	7
C. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN PROVINSI JAWA BARAT ...	16
A. Analisis Capaian Sasaran	16
B. Akuntabilitas Keuangan	62
BAB IV PENUTUP	67
Kesimpulan	67
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat merupakan unit eselon II mandiri yang berkedudukan di Provinsi yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan melalui pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif di daerah telah menetapkan target dan sasaran kinerja yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Realisasi target kinerja ditetapkan melalui Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
2. Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional, Produktif, dan Proporsional serta berkinerja tinggi.

Adapun capaian kinerja pada setiap indikator kinerja utama secara ringkas dapat kami laporan sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 23.689.221.000,- terealisasikan sebesar Rp. 23.529.430.955,- atau sebesar 99,33%;
2. Dari 21 Indikator Kinerja kegiatan, sebanyak 8 indikator kinerja melebihi target, 10 indikator kinerja sesuai dengan target dan 3 indikator kinerja tidak memenuhi target yang ditetapkan;
3. Nilai kinerja anggaran 86,61 dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 87;
4. Capaian output sampai dengan akhir tahun 2023 target 1.014 terealisasi 1.100 atau 108,48%;
5. Sisa anggaran merupakan penghematan dari Belanja Barang dan Belanja Pegawai;
6. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja:
 - a. Penyelarasan jadwal kegiatan dalam rangka program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
 - b. Melaksanakan distribusi tugas lintas seksi;

- c. Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait lainnya dengan maksud untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan lintas aparat penegak hukum dan membuat aturan bersama lintas aparat penegak hukum dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BNN dalam hal penanganan pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional;
- f. Optimalisasi Pendidikan pelatihan bagi personil BNNP Jawa Barat;
- g. Membangun tim kerja yang solid di setiap Bagian/Bidang di lingkungan BNNP Jawa Barat;
- h. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis web base sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja

BAB I

A. Gambaran Umum

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan *extraordinary* yang mendapat perhatian khusus dari seluruh negara di dunia, terorganisir lintas negara/internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Sehingga kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara- negara di dunia termasuk Indonesia.

Pada tahun 2015 presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia berada dalam situasi darurat narkotika dan pada ulang tahun BBN RI ke-20 tahun 2022 presiden juga mengamanatkan agar terus bekerja penuh semangat memerangi penyalahgunaan narkotika di berbagai kalangan seluruh pelosok Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dan bersih dari narkoba.

Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 Km² menurut Data BPS Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 50,025 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 27 Kabupaten/Kota, 626 Kecamatan dan 5.962 Desa/Kelurahan. Sehingga dengan luas wilayah dan penyebaran penduduk perlu dilakukan strategi dalam penanganan narkoba di wilayah provinsi Jawa Barat. BNN mencatat adanya penurunan angka prevalensi penyalahguna narkoba pernah pakai sebesar 1,95% di tingkat nasional tahun 2021 menjadi hanya 1,73% penyalahguna narkoba di tahun 2023, sehingga terdapat penurunan sebesar 0,22%, yang artinya dari 10.000 orang penduduk Indonesia berumur 15-64 tahun terdapat 173 orang diantaranya terpapar narkoba selama satu tahun terakhir atau setara dengan 3,33 juta jiwa penduduk berumur 15-64 tahun.

Secara umum angka prevalensi setahun pakai dan pernah pakai laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba satu tahun terakhir pada laki-laki di tahun 2023 adalah 2,41%, yang artinya dari 10.000 orang penduduk laku-laki berumur 15-64 tahun terdapat 241 orang diantaranya terpapar narkoba selama satu tahun terakhir.

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba selama satu tahun terakhir pada perempuan tahun 2023 adalah 1,03% yang artinya dari 10.000 orang penduduk

perempuan berumur 15-64 tahun terdapat 103 orang diantaranya terpapar narkoba selama satu tahun terakhir. (*Paparan uji publik hasil penelitian BNN Tahun 2023*).

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan tujuan LAKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Perpres 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor SP DIPA- 066.01.2.682469/2024 tanggal 28 November 2023.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

1. Tugas

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

- Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
 - Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
 - Pelayanan administrasi.
3. Kewenangan
- Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten yang sudah vertikal sebanyak 14 Kota/kabupaten, yaitu :
- 1) BNNK Bandung;
 - 2) BNNK Bandung Barat;
 - 3) BNNK Bogor;
 - 4) BNNK Cimahi;
 - 5) BNNK Cianjur;
 - 6) BNNK Ciamis;
 - 7) BNNK Cirebon;
 - 8) BNNK Depok;
 - 9) BNNK Garut;
 - 10) BNNK Karawang;
 - 11) BNNK Kuningan;
 - 12) BNNK Sukabumi;
 - 13) BNNK Sumedang;
 - 14) BNNK Tasikmalaya
- Dan Masih terdapat 13 Kota/Kabupaten yang belum menjadi instansi vertikal.

4. Struktur Organisasi

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen;
4. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA

Rencana strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional tahun 2020-2024 menetapkan tujuan dalam periode waktu 2020-2024 yaitu:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat Dari Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba
2. Mewujudkan Transformasi Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Sedangkan sasaran strategis BNN yaitu:

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
2. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Adapun Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari rencana strategis BNN tahun 2020-2024, program tersebut adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN serta Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Tabel Rencana Kerja BNN Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 kami sajikan dalam lampiran laporan ini.

B RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran Rencana Program Kerja dalam target tahunan dan media penghubung antara renproja dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun.

Untuk tahun 2023 BNN Provinsi Jawa Barat memiliki rencana kinerja tahunan sebagai berikut:

Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	5 Kabupaten /Kota	1.427.000.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kabupaten /Kota	1.510.000.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	14 Kabupaten /Kota	3.284.412.000
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	165.415.000
		Meningkatkan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	3,00 Indeks	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
5.	Kegiatan Pasca Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika	Percentase Penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	65%	375.099.000
		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,275 Indeks	
6.	Kegiatan penguatan rehabilitasi instansi pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	150 orang	373.877.000
		Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 orang	
7.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal yang operasional di wilayah provinsi	8 Lembaga	2.683.796.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	30 Unit	
8.	Kegiatan Pelaksana Intelijen Berbasis Teknologi	Meningkatnya Pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	210.000.000
9.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	25 Berkas Perkara	1.280.000.000
10	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	452.550.000
		Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	
11.	Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	315.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
12.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	92 Indeks	15.029.908.000
		Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	14 Kabupaten /Kota	
13.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	-	-	-	329.334.000
14.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	437.778.000
		Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	14 Kabupaten /Kota	
15.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	-	-	-	19.788.414.000
16.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	-	-	-	315.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
17.	Program Pembangunan Zona Integritas	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75 Indeks	-

C PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan yang berisikan penugasan dan pimpinan unit organisasi yang lebih tinggi kepada pimpinan unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahunan BNN Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	5 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	14 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspadा"	1 Kawasan
5	Meningkatkan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	3,00 Indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	65%
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	150 Orang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
8	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas rehabilitasi yang bersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	8 Lembaga
10	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	30 Unit
11	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3.273 Indeks
12	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Jaringan
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	92 Indeks
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	14 Kabupaten/Kota
15	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	25 Berkas Perkara
16	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks
17	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
18	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	14 Kabupaten/Kota
19	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
20	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
21	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75 Indeks

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A Analisis Capaian Sasaran

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati antara Kepala BNN RI dan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat terdapat 15 (Lima belas) sasaran Kegiatan, dengan indikator kinerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) indikator kinerja. Gambaran capaian keberhasilan atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagaimana table berikut ini:

Tabel. III.1 Capaian sasaran kegiatan BNN Provinsi Jawa Barat TA 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
5.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika	Percentase penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	65%	67,62%	104%
6	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,00	3,10	103%
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	150 Orang	164 Orang	109%
8	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	10 Orang	100%
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	8 Lembaga	8 Lembaga	100%
10	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	30 Unit	35 Unit	116%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4	5	6
11	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,273	3,42	104%
12	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan	100%
13	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	25 Berkas	53 Berkas	212%
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100%
15	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100%
16	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas	1 Berkas	100%
17	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Barat	87	86,89	99,8%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4	5	6
18	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	14 Kab/ Kota	9 Kab/ Kota	64%
19	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Barat	92 Indeks	98,46	107%
20	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	14 Kab/Kota	13 Kab/Kota	92%
21	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Mencapai zona integritas BNN berdasarkan penilaian interna;	75 Indeks	81,56 Kab/ Kota	108%

Dari 21 (Dua puluh satu) Indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan:

1. 8 indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan;
2. 10 indikator sesuai target yang diharapkan;
3. 3 indikator kinerja di bawah target yang ditetapkan.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat selama tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2023 dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan periode tahun sebelumnya dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Adapun pengukuran capaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana uraian berikut :

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diimplementasikan dalam indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100%

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. sedangkan Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi Self Regulation, Assertiveness dan Reaching Out dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas BNNP-BNNK dalam Kegiatan Pengelolaan Informasi (data dukung) yang dibandingkan dengan Data Sekunder yaitu Kasus Narkoba Remaja (pada lokus kegiatan), Kegiatan Positif Remaja serta Jumlah Remaja yang mengikuti Kegiatan Positif. Nilai akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Informasi dan Edukasi dengan fokus Remaja di lingkungan Sekolah dan Kampus. Mekanisme pengukurannya dilakukan dengan pengumpulan data berupa kuesioner dalam aplikasi berbasis web.

Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNN Kab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota. (*Surat Deputi Cegah BNN RI No.4729 Tanggal 27 Desember 2023*).

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi yang dapat dijadikan pengukuran adalah kegiatan yang bersifat tatap muka (Insert Konten, Talk Show, dan Pagelaran atau kegiatan lain yang dapat mengumpulkan data peserta melalui Teknik snowball pada kegiatan di Sekolah atau Kampus) hingga dapat memperoleh jangkauan peserta/sebagai responden agar alat ukur (kuisisioner) dapat dijalankan. Target dari masing-masing kegiatan adalah 50 (lima puluh) orang (sesuai Standar Aktivitas). Kuesisioner akan berbentuk aplikasi berbasis web bernama Dektari, agar dapat mudah diakses oleh peserta/responden (Online system), namun apabila tidak dapat terselenggara secara online maka pelaksana pengukuran bertanggung jawab untuk menginput Kuesisioner secara online ke dalam sistem aplikasi berbasis web. Selanjutnya petugas/pelaksana pengukuran mengarahkan agar aplikasi kuesisioner tersebut dapat terisi dan menjadi kontribusi bagi nilai ketahanan diri di lingkungannya masing-masing. Dengan demikian dalam pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja tidak dibutuhkan kegiatan khusus dalam pengumpulan data, cukup peserta dalam kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi dan sejenisnya dapat menjadi responden dalam pengukuran ini.

Adapun klasifikasi Hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah sebagai berikut:

- a. Kategori Sangat Tinggi $\geq 53,71$
- b. Kategori Tinggi $49,74 - 53,50$
- c. Kategori Rendah $45,98 - 49,73$
- d. Kategori Sangat Rendah $\leq 45,97$

Kendala pada capaian indikator kinerja ini sebagian responden tidak dapat menyimpan data kuesioner secara online sehingga harus mengulang berkali - kali, perlu dilakukan kajian kembali terkait pelaksanaan softskill, terutama bahan ajar bagi peserta yang disesuaikan dengan karakteristik jenjang pendidikan SMP dan SMU. Strategi pencapaian berkoordinasi dengan pembina fungsi program di kedeputian mengenai langkah strategis untuk mengantisipasi gangguan pada sistem aplikasi, berkoordinasi dengan para narasumber untuk menyesuaikan bahan materi sehingga output dan outcome dapat sesuai dengan capaian keberhasilan program.

Pada tahun 2023 Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 5 kab/kota dari target sebanyak 5 Kab/Kota atau sebesar 100% dengan indeks rata-rata 52,56 Dektari Provinsi Jabar berkategori Tinggi dengan rincian sebagai berikut:

SATUAN KERJA	DEKTARI PER DESEMBER 2023	KATEGORI DEKTARI PER DESEMBER 2023
BNNP Jawa Barat	41,19	Sangat Rendah
BNN Kota Bandung	52,72	Tinggi
BNN Kabupaten Bandung Barat	54,63	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Bogor	55,67	Sangat Tinggi
BNN Kota Cimahi	56,25	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Cianjur	55,31	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Ciamis	52,53	Tinggi
BNN Kota Cirebon	54,10	Sangat Tinggi
BNN Kota Depok	52,18	Tinggi
BNN Kabupaten Garut	55,34	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Karawang	52,99	Tinggi
BNN Kabupaten Kuningan	54,37	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Sumedang	54,42	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Sukabumi	44,65	Sangat Rendah
BNN Kota Tasikmalaya	52,16	Tinggi
DEKTARI PROVINSI JABAR	52,56	Tinggi

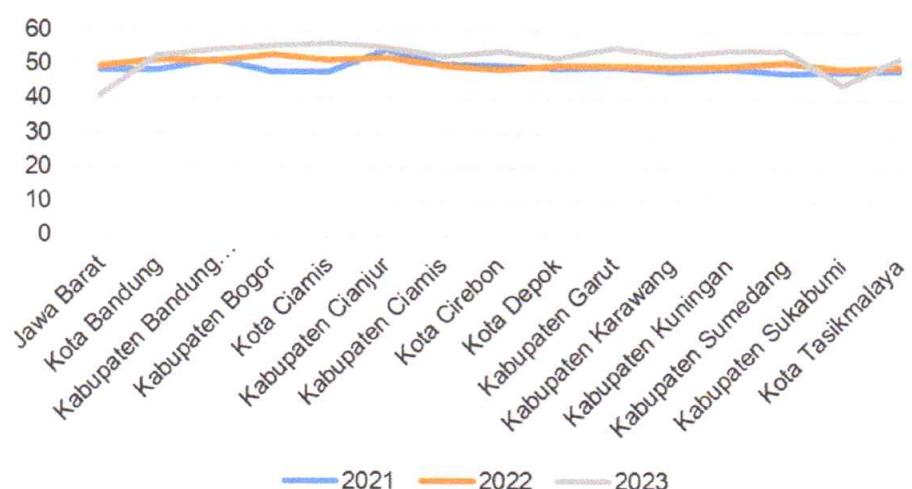
Adapun pada tahun 2021 dan 2022, jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 9 kab/kota dari target sebanyak 3 Kab/Kota atau sebesar 300%.

SATUAN KERJA	DEKTARI PER DESEMBER 2021	KATEGORI DEKTARI PER DESEMBER 2021	DEKTARI PER DESEMBER 2022	KATEGORI DEKTARI PER DESEMBER 2022
BNNP Jawa Barat	48.23	Rendah	49.57	Rendah
BNN Kota Bandung	48.38	Tinggi	51.54	Rendah
BNN Kabupaten Bandung Barat	51.58	Tinggi	50.93	Tinggi
BNN Kabupaten Bogor	48.11	Tinggi	53.02	Rendah
BNN Kota Cimahi	48.16	Tinggi	51.31	Rendah
BNN Kabupaten Cianjur	54.4	Tinggi	52.02	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Ciamis	50.45	Tinggi	49.84	Tinggi
BNN Kota Cirebon	49.96	Rendah	48.9	Tinggi
BNN Kota Depok	49.27	Rendah	49.73	Rendah
BNN Kabupaten Garut	49.52	Rendah	49.72	Rendah
BNN Kabupaten Karawang	48.27	Rendah	49.63	Rendah
BNN Kabupaten Kuningan	49.03	Tinggi	49.9	Rendah
BNN Kabupaten Sumedang	48.02	Tinggi	50.91	Rendah
BNN Kabupaten Sukabumi	48.39	Rendah	49.28	Rendah

BNN Kota Tasikmalaya	48.83	Tinggi	50.06	Rendah
DEKTARI PROVINSI JABAR	49.37	Tinggi	50.43	Rendah

Sedangkan pada tahun 2022 Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 9 kab/kota dari target sebanyak 4 Kab/Kota atau sebesar 225%. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba tahun 2021 dan 2022 dapat kami sampaikan dengan rincian sebagai berikut:

DEKTARI PER DESEMBER



Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2023, capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba; tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah dalam upaya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; Meningkatnya peranan mitra masyarakat dalam upaya pencegahan; meningkatnya koordinasi tingkat pusat dalam hal fasilitas yang meliputi bimbingan teknis, penyediaan materi dan acuan pelaksanaan informasi dan edukasi P4GN.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu jumlah institusi / lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba. Adapun target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. sedangkan Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada 14 Kabupaten/Kota wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resilience Measure).

Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNN Kab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba,kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota

Adapun Klasifikasi Hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga adalah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi 88,31 – 100,00.
- 2) Kategori tinggi 76,61 – 88,30
- 3) Kategori Rendah 65,00 – 76,60
- 4) Kategori sangat rendah 25,00 – 64,99

salah satu kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas pegawai sebagai fasilitator.

Sedangkan upaya strategi pencapaian target adalah dengan berkoordinasi dan lebih meningkatkan sinergitas dengan stakeholder terkait dan Memfasilitasi percepatan penerbitan PERDA tentang P4GN oleh Kesbangpol dan Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2023 Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 14 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

SATKER	NILAI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK) TAHUN 2023	KATEGORI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK) TAHUN 2023
BNNP Jawa Barat	77,054	Tinggi
BNN Kota Bandung	87,321	Tinggi
BNN Kabupaten Bandung Barat	88,571	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Bogor	88,304	Tinggi
BNN Kota Cimahi	91,250	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Cianjur	85,625	Tinggi
BNN Kabupaten Ciamis	78,125	Tinggi
BNN Kota Cirebon	95,714	Sangat Tinggi
BNN Kota Depok	85,804	Tinggi
BNN Kabupaten Garut	88,393	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Karawang	82,321	Tinggi
BNN Kabupaten Kuningan	86,339	Tinggi

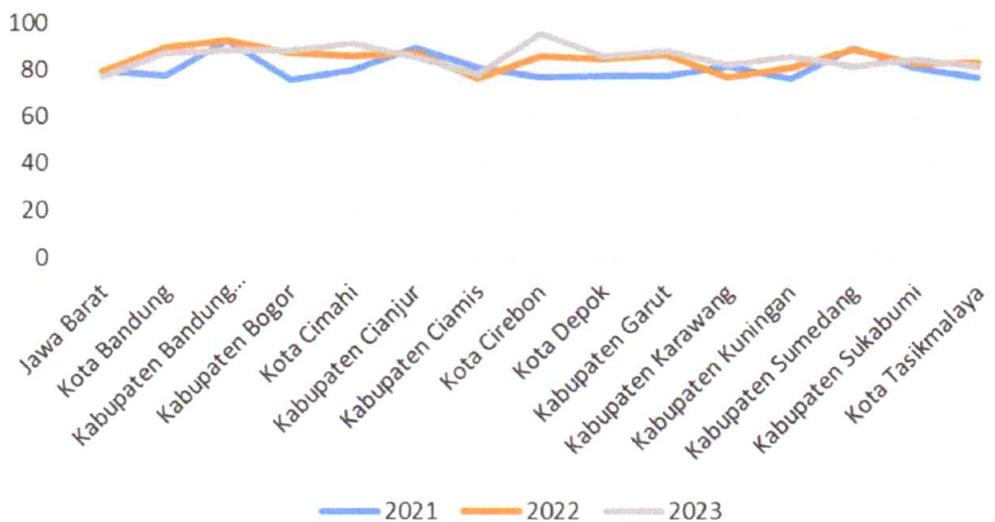
BNN Kabupaten Sumedang	82,054	Tinggi
BNN Kabupaten Sukabumi	84,643	Tinggi
BNN Kota Tasikmalaya	81,875	Tinggi

Adapun pada tahun 2021, Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 13 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 93%.

SATUAN KERJA	NILAI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK) TAHUN 2021	KATEGORI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK) TAHUN 2021	NILAI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK) TAHUN 2022	KATEGORI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK) TAHUN 2022
BNNP Jawa Barat	79.554	Tinggi	79,554	Tinggi
BNN Kota Bandung	77.679	Tinggi	89,464	Tinggi
BNN Kabupaten Bandung Barat	93.036	Sangat Tinggi	92,50	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Bogor	75.554	Tinggi	87,143	Tinggi
BNN Kota Cimahi	79.821	Tinggi	85,982	Tinggi
BNN Kabupaten Cianjur	89.821	Sangat Tinggi	87,054	Tinggi
BNN Kabupaten Ciamis	81.429	Tinggi	76,607	Rendah
BNN Kota Cirebon	77.143	Tinggi	85,893	Tinggi
BNN Kota Depok	77.589	Tinggi	84,911	Tinggi
BNN Kabupaten Garut	77.768	Tinggi	86,429	Tinggi
BNN Kabupaten Karawang	82.054	Tinggi	77,232	Tinggi
BNN Kabupaten Kuningan	76.607	Rendah	81,16	Tinggi
BNN Kabupaten Sumedang	89,554	Sangat Tinggi	89,107	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Sukabumi	81,250	Tinggi	82,946	Tinggi
BNN Kota Tasikmalaya	77,143	Tinggi	83,661	Tinggi

Sedangkan ada tahun 2022, Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 13 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 93 %. Perbandingan pencapaian indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat dapat kami sajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :

INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK)



Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2022, capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba; tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah dalam upaya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; Meningkatnya peranan mitra masyarakat dan stakeholder dalam upaya menciptakan ketahanan keluarga melalui kegiatan yang terintegrasi; Meningkatnya koordinasi tingkat pusat dalam hal fasilitas yang meliputi bimbingan teknis, penyediaan materi dan acuan pelaksanaan informasi dan edukasi P4GN.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) masyarakat di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN. Adapun target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
3.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan Pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba;

Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut:

- a. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

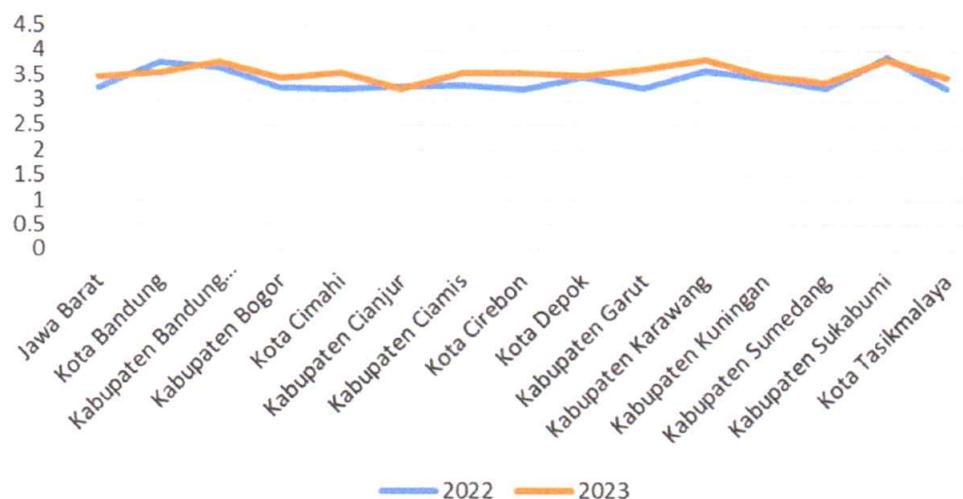
Adapun Klasifikasi Nilai Indeks Kemandirian Partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Tidak Mandiri : 1.00 – 1.75
2. Kurang Mandiri : 1.76 – 2.50
3. Mandiri : 2.51 – 3.25
4. Sangat Mandiri : 3.26 – 4.00

Pada tahun 2022 Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 14 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

SATKER	REALISASI NILAI INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2022	KATEGORI	REALISASI NILAI INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2023	KATEGORI
BNNP Jawa Barat	3,25	Mandiri	3,46	Sangat Mandiri
BNN Kota Bandung	3,76	Sangat Mandiri	3,56	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Bandung Barat	3,66	Sangat Mandiri	3,76	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Bogor	3,25	Mandiri	3,43	Sangat Mandiri
BNN Kota Cimahi	3,22	Mandiri	3,54	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Cianjur	3,27	Sangat Mandiri	3,21	Mandiri
BNN Kabupaten Ciamis	3,30	Sangat Mandiri	3,56	Sangat Mandiri
BNN Kota Cirebon	3,22	Mandiri	3,12	Mandiri
BNN Kota Depok	3,47	Sangat Mandiri	3,495	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Garut	3,26	Sangat Mandiri	3,62	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Karawang	3,59	Sangat Mandiri	3,815	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Kuningan	3,45	Sangat Mandiri	3,5	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Sumedang	3,26	Sangat Mandiri	3,365	Sangat Mandiri
BNN Kabupaten Sukabumi	3,87	Sangat Mandiri	3,82	Sangat Mandiri
BNN Kota Tasikmalaya	3,25	Mandiri	3,456	Sangat Mandiri

NILAI INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP)



Adapun pada tahun 2021, Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 14 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, capaian indicator kinerja kegiatan tahun 2022 sama sama mencapai target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan:

- a. adanya keterlibatan setiap unsur dari berbagai aspek lingkungan yang bersinergi dalam kegiatan P4GN di setiap lingkungan yaitu Pendidikan, Pemerintah, Masyarakat dan Swasta.
- b. Keterlibatan pimpinan dan pengambil kebijakan dari setiap lingkungan membuat regulasi mengenai kegiatan P4GN di Provinsi Jawa Barat karena terselenggaranya program P4GN juga sangat penting sehingga tercipta Jabar Bersinar.
- c. Kesungguhan dari para penggiat untuk melaksanakan tugas mulia sebagai penggiat anti narkoba dilingkungan masing masing sehingga menjadikan Provinsi Jawa Barat bersih dari Narkoba.
- d. Adanya tindak lanjut dan monev setelah kegiatan yang menjadikan stimulasi untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat yang Tahan terhadap Narkoba.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja tersebut. Indikator kinerja kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100 %
2.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,00	3,10	103 %

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program pemberdayaan alternatif.

Indikator keberhasilan ini merupakan ukuran sejauh mana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran, antara lain:

1. Penyelenggaraan program;
2. Pelaksana program;
3. Keberlanjutan program;
4. Sinergi instansi pemerintah;
5. Kemitraan dunia usaha;
6. Pelibatan organisasi sosial masyarakat;
7. Hasil program yang dirasakan masyarakat.

Klasifikasi Nilai Keterpulihan Kawasan rawan (IKKR) adalah sebagai berikut :

Nilai Interval	Kriteria
1,00 – 1,75	Bahaya
1,76 – 2,50	Waspada
2,51 – 3,25	Siaga
3,26 – 4,00	Aman

Pada tahun 2023, Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 2 kawasan dari target sebanyak 2 kawasan atau sebesar 100%. Dengan indek nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi 2,36 dari target 3,03.

Tahun 2022 Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 1 kawasan dari target sebanyak 1 kawasan atau sebesar 100%. Target tersebut ada di Desa Rancamanyar Kecamatan Rancamanyar Kabupaten Bandung. Capaian nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi adalah 3,10 untuk BNNP Jabar.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2022, capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2023 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya keselarasan dan sinergi yang baik antara Penyelenggaraan program, Pelaksana program, Keberlanjutan program, Sinergi instansi pemerintah, Kemitraan dunia usaha, Pelibatan organisasi sosial masyarakat dan Hasil program yang dirasakan masyarakat.

Strategi pencapaian yang dilakukan adalah adanya Intervensi kepada Pemda terkait anggaran untuk program Kawasan rawan - Bekerjasama dengan CSR setempat untuk menindaklanjuti program dimaksud.

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyalahguna dan/atau pencandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	65%	67,62%	109 %

Indikator kinerja pada sasaran ini ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023. sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 sasaran kegiatan dan indikator kinerja ini belum ditetapkan namun upaya upaya strategis dalam pencapaian target terus dilakukan salah satunya dengan terus melakukan pemantauan dan pendampingan secara intensif terhadap klien.

Pencapaian target masih relatif kecil disebabkan adanya kendala dalam pelaksanaan program dan pencapaian target karena tidak semua komponen dapat meningkat karena keterbatasan proses rehabilitasi (komponen lingkungan & sosial).

Pada tahun 2023 capaian indeks Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup di wilayah Jawa Barat adalah sebagai berikut :

NO	WILAYAH KERJA	INDEKS PERSENTASE KUALITAS HIDUP 2023
1	BNNP Jawa Barat	67,62
2	BNN Kota Bandung	65,91
3	BNN Kota Cimahi	76,09
4	BNN Kota Cirebon	88,03
5	BNN Kota Depok	87,10
6	BNN Kota Tasikmalaya	76,09
7	BNN Kab. Bandung Barat	66,94
8	BNN Kab. Bogor	86,40
9	BNN Kab. Ciamis	94,53
10	BNN Kab. Cianjur	96,43
11	BNN Kab. Garut	51,92
12	BNN Kab. Karawang	93,45
13	BNN Kab. Kuningan	97,12
14	BNN Kab. Sukabumi	82,69
15	BNN Kab. Sumedang	99,19
	Rata-rata Jawa Barat	77,54

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

Untuk mendukung sasaran kegiatan ini ditetapkanlah 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang disajikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	150 Orang	164 Orang	109%
2.	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	10 Orang	100%

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Sedangkan untuk Petugas lembaga rehabilitasi yang bersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi adalah petugas pelaksana pelayanan rehabilitasi yang telah mengikuti peningkatan kompetensi teknis dan bersertifikasi sesuai bidangnya (dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial). Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana pelayanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi (baik dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial) yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan rehabilitasi narkoba dan memperoleh

sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi narkoba dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Pada tahun 2023 Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat terealisasi sebanyak 164 orang dari target sebanyak 150 orang atau sebesar 109%. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan sesuai DIPA di masing-masing satker yang ada di Wilayah Jawa Barat terhadap agen pemulihan di setiap unit IBM binaannya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

NO	WILAYAH KERJA	CAPAIAN PETUGAS PENYELENGGARA LAYANAN IBM YANG TERLATIH
1	BNNP Jawa Barat	164
2	BNN Kota Bandung	20
3	BNN Kota Cimahi	10
4	BNN Kota Cirebon	13
5	BNN Kota Depok	10
6	BNN Kota Tasikmalaya	10
7	BNN Kab. Bandung Barat	11
8	BNN Kab. Bogor	14
9	BNN Kab. Ciamis	10
10	BNN Kab. Cianjur	10
11	BNN Kab. Garut	15
12	BNN Kab. Karawang	15
13	BNN Kab. Kuningan	10
14	BNN Kab. Sukabumi	10
15	BNN Kab. Sumedang	10
		332 Orang

Sedangkan Jumlah petugas Rehabilitasi yang bersertifikasi kompetensi teknis di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat terealisasi sebanyak 10 orang dari target sebanyak 10 orang atau sebesar 100% pada tahun 2023. Tahun 2022 terealisasi sebanyak 10 orang dari target 15 orang atau 66,67 %. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari dengan 15 orang peserta pada tanggal 26 s.d. 28 September 2022 dengan hasil sebanyak 10 orang peserta berpredikat kompeten dan sebanyak 5 orang peserta berpredikat belum kompeten.

Adapun pada tahun 2021, Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat terealisasi sebanyak 100 orang dari target sebanyak 85 orang atau sebesar 175%. Dan Jumlah petugas Rehabilitasi yang bersertifikasi kompetensi teknis di wilayah BNN Provinsi Jawa Barat terealisasi sebanyak 20 orang dari target sebanyak 20 orang atau sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2022 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya keselarasan dan sinergi yang baik antara Penyelenggaraan program, Pelaksana program, Keberlanjutan program, Sinergi instansi pemerintah, Kemitraan dunia usaha, Pelibatan organisasi sosial masyarakat dan Hasil program yang dirasakan masyarakat. Sedangkan strategi yang akan diterapkan pada tahun depan adalah:

- Menambah kompetensi konselor adiksi melalui bimbingan teknis baik secara virtual maupun kunjungan langsung memanfaatkan anggaran bimtek yang tersedia.
- Bekerjasama dengan Instansi Terkait (Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial) dan Lembaga Profesi (IKAI Prov Jabar) dalam penyelenggaraan pelatihan bagi Petugas Rehabilitasi.

Sasaran Kegiatan 7

Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 indikator yaitu Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi. Adapun target dan realisasinya disajikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	8 Lembaga	8 Lembaga	100%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	30 Unit	35 Unit	130%

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang telah mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) minimal kategori B (Minimal 73%).

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

2. Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Di tahun 2023 ini, BNNP Jawa Barat mengajukan 4 lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan 3 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memenuhi standar pelayanan minimal ke Deputi Rehabilitasi BNN, yang terdiri dari, Klinik Pratama BNNK Cirebon, Klinik Pratama BNNK Sukabumi, Klinik Pratama BNNK Sumedang, Klinik Pratama BNNK Bandung, Puskesmas karawang Kota, Klinik Karya Sehat Nusantara, Graha Suar Indonesia, dan Yayasan Grafiks. Pengajuan atas 8 lembaga tersebut, setelah melalui proses verifikasi, bimbingan teknis virtual dan kunjungan langsung yang dilakukan oleh BNNP Jabar, setelah masing-masing lembaga tersebut menandatangani perjanjian kerja sama dengan BNN, di tahun anggaran 2022 ini. Di akhir periode, petugas BNNP Jabar melakukan proses penilaian terhadap masing-masing lembaga, menggunakan form SPM dari Deputi Rehabilitasi BNN, untuk selanjutnya dilakukan rapat pleno di tingkat pusat, untuk penentuan lembaga rehabilitasi mana saja yang memenuhi standar penilaian minimal di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan hasil yang diterima oleh BNNP Jawa Barat

telah memenuhi target yaitu terdapat 8 lembaga dari 8 lembaga yang dinilai, yang telah memenuhi standar pelayanan minimal.

NO	NAMA LEMBAGA	TAHUN 2023	KETERANGAN
		KATEGORI (A/B/C)	
1	Klinik Pratama BNNK Bandung	A	Memenuhi SPM
2	Klinik Pratama BNN Cirebon	A	Memenuhi SPM
3	Klinik Pratama BNNK Sukabumi	A	Memenuhi SPM
4	Klinik Pratama BNNK Sumedang	A	Memenuhi SPM
5	Puskesmas Karawang Kota	A	Memenuhi SPM
6	Yayasan Grafiks	A	Memenuhi SPM
7	Graha suar Indonesia	A	Memenuhi SPM
8	Klinik Karya Sehat Nusantara	A	Memenuhi SPM

Sedangkan untuk Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi yang tercapai adalah sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) unit IBM dari target 20 unit IBM atau sebesar 130% dengan rincian sebagai berikut dari:

NO	WILAYAH KERJA	CAPAIAN	UNIT IBM
1	BNNP Jawa Barat	30	35 Unit
2	BNN Kota Bandung	2	2 Unit
3	BNN Kota Cimahi	2	2 Unit
4	BNN Kota Cirebon	2	2 Unit
5	BNN Kota Depok	2	2 Unit
6	BNN Kota Tasikmalaya	2	2 Unit
7	BNN Kab. Bandung Barat	2	2 Unit
8	BNN Kab. Bogor	2	3 Unit
9	BNN Kab. Ciamis	2	2 Unit
10	BNN Kab. Cianjur	2	2 Unit
11	BNN Kab. Garut	2	2 Unit
12	BNN Kab. Karawang	2	2 Unit
13	BNN Kab. Kuningan	2	2 Unit
14	BNN Kab. Sukabumi	2	2 Unit
15	BNN Kab. Sumedang	2	2 Unit

Adapun pada tahun 2021 Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi yang tercapai adalah 8 lembaga dari target 8 lembaga atau 100% sedangkan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi yang tercapai adalah 35 Unit IBM dari target 30 Unit IBM atau sebesar 130%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022, capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2023 mengalami kenaikan baik dari segi target maupun realisasi. Hal ini bisa tercapai karena strategi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Optimalisasi pelaksanaan bimbingan teknis di masing-masing Lembaga melalui Bimtek Virtual.
2. Membuat form self-asesmen sebagai penyaring lembaga yang sekiranya mampu untuk memenuhi SPM di tahun ini.
3. Memfokuskan kegiatan Bimtek Tatap Muka ke Lembaga yang secara self asesmen sudah memiliki nilai yang tidak jauh dari SPM.
4. Mengupayakan koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan di masing-masing unit IBM.
5. Melakukan sosialisasi dan pendekatan secara intensif dengan komunitas agar terjalin hubungan yang baik.
6. Melakukan asistensi dan pemantauan oleh petugas BNNP dengan para petugas IBM.

Sasaran Kegiatan 8

Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Barat	3,275	3,42	104%

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada Keputusan Menenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2023 Berdasarkan penghitungan atas kuesioner yang diberikan kepada 36 partisipan yang memenuhi kriteria inklusi selama bulan Januari s.d Desember 2023, didapatkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat di Klinik Pratama BNNP Jawa Barat adalah sebesar 3,42. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja Klinik Pratama BNNP Jabar dinilai baik (mutu B).

Adapun untuk nilai indeks kepuasan masyarakat di tiap unsur, didapatkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

NO	WILAYAH KERJA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2023
1	BNNP Jawa Barat	3,52
2	BNN Kota Bandung	3,29
3	BNN Kota Cimahi	3,5
4	BNN Kota Cirebon	3,49
5	BNN Kota Depok	3,55
6	BNN Kota Tasikmalaya	3,41
7	BNN Kab. Bandung Barat	3,36
8	BNN Kab. Bogor	3,63
9	BNN Kab. Ciamis	3,42
10	BNN Kab. Cianjur	3,84
11	BNN Kab. Garut	3,72
12	BNN Kab. Karawang	3,93
13	BNN Kab. Kuningan	3,32
14	BNN Kab. Sukabumi	3,52
15	BNN Kab. Sumedang	3,4

Berdasarkan nilai IKM tiap unsur, dapat diketahui bahwa unsur yang mendapat penilaian paling tinggi di Klinik Pratama BNNP Jawa Barat adalah pada perilaku pelaksana yang mana mendapatkan penilaian baik (3,528) dengan mutu B.

Selanjutnya diikuti oleh unsur sistem mekanisme dan prosedur yang mendapatkan nilai 3,417 (mutu B), unsur sarana prasarana dengan nilai 3,417 (mutu B), unsur persyaratan yang mendapatkan nilai IKM sebesar 3,319 (mutu B), unsur kompetensi pelaksana sebesar 3,296 (mutu B), unsur waktu pelayanan sebesar 3,222 (mutu B), unsur biaya/ tarif dan penanganan aduan saran dan masukan masing-masing mendapatkan nilai 3,208 (mutu B), dan unsur produk, spesifikasi jenis layanan mendapatkan nilai 3,167 (mutu B).

Adapun pada tahun 2021 Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Barat yang tercapai adalah 3,26 dari target 3,2 atau 101%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2022 pencapaian target indikator ini 3,314 dengan target 3,26. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 target 3,275 dengan pencapaian 3,42. Terjadi Hal ini terjadi karena koordinasi secara lebih intensif dengan petugas yang mengkompilir data di pusat serta dari para partisipannya.

Sasaran Kegiatan 9

Meningkatnya Pemetaan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika yang berhasil dipetakan Adapun target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Jaringan	1 Jaringan	100%

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Peta jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah gambaran dari satu atau beberapa jaringan sindikat narkotika yang memiliki/memproduksi mengedarkan/menyelundupkan narkotika dan prekursor narkotika. Pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah satu atau lebih uraian anggota jaringan yang melakukan kegiatan/aktivitas menyelundupkan/mengedarkan

memproduksi/memiliki narkotika dan prekursor narkotika dengan peran yang berbeda-beda yang didalamnya terdapat risalah jaringan yang uraikan secara detail, sehingga penggambaran satu jaringan dapat diketahui secara utuh. Laporan Informasi Intelijen adalah laporan dari satu atau lebih hasil analis IT dan penyelidikan taktis (tim lapangan) mengenai aktivitas orang yang terkait dalam jaringan sindikat narkotika dan prekursor narkotika baik lokal maupun internasional yang diduga mengarah kepada peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang akan menjadi bahan kebijakan Pimpinan.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mengakumulasi jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang telah berhasil dipetakan berdasarkan data laporan informasi intelijen dari unit pusat dan vertikal.

Pada tahun 2022 Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan adalah 2 jaringan dari target 1 jaringan atau sebesar 200%. Kegiatan ini dilaksanakan Selama bulan Januari s.d Desember 2022 dan berhasil melakukan 10 kali ungkap kasus kasus narkotika dengan 2 jaringan peredaran gelap narkotika.

Adapun pada tahun 2021 Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan adalah 2 jaringan dari target 2 jaringan atau sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2022 capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2023 mengalami perubahan Hal ini terjadi adanya perubahan pada porsi refocusing anggaran sehingga pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika kurang maksimal terpetakan , Kurangnya alat pendukung dalam pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Upaya yang dilakukan adalah Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan peta kerawanan tindak pidana dan peredaran gelap narkotika, Menyiapkan pelatihan kepada sumber daya / personil intelijen yang terus menerus dalam melakukan pendekatan, penggalangan kepada provider-provider, TNI, POLRI, Bea Cukai, Kantor Pos, instansi-intansi pemerintahan, dan seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran Kegiatan 10

Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari indikator jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21. Adapun target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	25 Berkas	53 Berkas	212%

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.

Pada tahun 2022 Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang ditangani penyidik BNNP yang sudah P-21 periode Januari s.d Desember 2022 ada 23 berkas. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang ditangani penyidik BNNK di 13 BNNK di Jawa Barat yang sudah P-21 adalah 35 berkas perkara dan sedangkan BNN Kab Cianjur dan BNN Kota Tasikmalaya tidak ada berkas yang P-21. berkas perkara yang sudah P-21.

Tahun 2023 BNNK di Jawa Barat yang sudah P-21 adalah 53 berkas perkara dari target 25 berkas perkara yang sudah P-21 dengan uraian sebagai berikut: dengan uraian sebagai berikut:

BERKAS NARKOTIKA BNNP JAWA BARAT DAN BNNK SE-JAWA BARAT

No.	SATKER	LKN	BERKAS	TERSANGKA		STATUS	BULAN LKN	BULAN P21
1	BNNP JAWA BARAT	LKN-004	BERKAS	1	TINO alias TILE	P21	JANUARI	APRIL
		LKN-005	BERKAS	1	EMAN alias GOBED	P21	FEBRUARI	MEI
			BERKAS	2	DEDEN KUSMAYA	P21	FEBRUARI	MEI
		LKN-006	BERKAS	1	DARMAWAN	P21	FEBRUARI	MEI
		LKN-007	BERKAS	1	MUHAMAD ALFARIZI	P21	FEBRUARI	MEI
		LKN-011	BERKAS	1	FADHILA KISWARI	P21	MARET	JUNI
		LKN-012	BERKAS	1	M IMAN MAULUDIN	P21	MARET	JUNI
		LKN-014	BERKAS	-	-	TEMUAN	MARET	-
		LKN-015	BERKAS	1	SUGENTA HERBI	P21	MARET	JUNI
		LKN-019	BERKAS	1	OBRIH SETIAWAN ALS BOY	P21	MEI	AGUSTUS
		LKN-021	BERKAS	1	SURJADI WIDJAJA	P21	JUNI	SEPTEMBER
		LKN-024	BERKAS	1	HENDRO BIN ASMAWI	P21	JUNI	SEPTEMBER
		LKN-026	BERKAS	1	ASEP KUSMAWAN	P21	JUNI	OKTOBER
		LKN-027	BERKAS	-	-	TEMUAN	JUNI	-
		LKN-029	BERKAS	1	HENDRIK ALS TUKIL	P21	JUNI	OKTOBER
		LKN-030	BERKAS	1	SUKANDI alias KUMIS	P21	JUNI	OKTOBER
			BERKAS	2	MUKHTAR MUHAMAD Y	P21	JUNI	OKTOBER
			BERKAS	3	HARI KUSYANTO	P21	JUNI	OKTOBER
		LKN-031	BERKAS	1	UIJANG SUPRIATNA	P21	JULI	OKTOBER
		LKN-032	BERKAS	1	WAWAN KUSNADI	P21	JULI	SEPTEMBER
		LKN-034	BERKAS	1	AMIRUDIN alias AMIR	P21	JULI	SEPTEMBER
			BERKAS	2	NURDIN alias DIN	P21	JULI	SEPTEMBER
			BERKAS	3	FIRMAN bin M. NUR	P21	JULI	SEPTEMBER
			BERKAS	4	TEUKU ARFIANSYAH	P21	JULI	SEPTEMBER
		LKN-039	BERKAS	1	MUHAMAD BASYAH	P21	SEPTEMBER	NOVEMBER
		LKN-041	BERKAS	1	SALMAN ALFARISY	P21	OKTOBER	DESEMBER
		LKN-043	BERKAS	1	FARHAN RAMDHANI	P21	OKTOBER	DESEMBER
		LKN-046	BERKAS	1	DIKI FIRMANSYAH	P21	NOVEMBER	DESEMBER
		LKN-048	BERKAS	1	-	TEMUAN	DESEMBER	-
		LKN-049	BERKAS	1	-	TEMUAN	DESEMBER	-
		LKN-050	BERKAS	1	BAMBANG NURDIANSYAH	SIDIK	DESEMBER	-
		LKN-052	BERKAS	1	TIO SADESTA	SIDIK	DESEMBER	-
2	BNN KOTA BANDUNG	LKN-018	BERKAS	1	ISMAIL FAIRUZ	P21	APRIL	JUNI
					ABDUL MAJID	P21	APRIL	JUNI
3	BNN KAB. KARAWANG	LKN-017	BERKAS	1	HERI HERLAMBANG	P21	APRIL	MEI
		LKN-036	BERKAS	1	DEDI IRAWAN, Als DEKA	P21	AGUSTUS	OKTOBER
		LKN-037	BERKAS	1	ASEP NOPARI ALS CEPOT	P21	SEPTEMBER	DESEMBER
		LKN-038	BERKAS	1	GUGUM KHOERUDIN	P21	SEPTEMBER	DESEMBER
4	BNN KOTA DEPOK	LKN-044	BERKAS	1	CATUR TEGUH PRASETYO	P21	NOVEMBER	DESEMBER
		LKN-047	BERKAS	1	AHMAD GEMPAH SANTOSO	SIDIK	DESEMBER	-
5	BNN KAB. SUKABUMI	LKN-025	BERKAS	1	DANDI AWALUDIN	P21	MEI	JULI
6	BNN KAB. BOGOR	LKN-002	BERKAS	1	JUNAEDI ABDULLAH	P21	JANUARI	MARET
			BERKAS	2	DODI SETIAWAN	P21	JANUARI	MARET
			BERKAS	3	SUBUR SANTOSO	P21	JANUARI	MARET
			BERKAS	4	ANDRI LUKMANA	P21	JANUARI	MARET
		LKN-003	BERKAS	1	ADE CAHYO OKTRIN	P21	JANUARI	JULI
		LKN-016	BERKAS	1	MUHAMMAD IRHAMSYAH	P21	MARET	JUNI
		LKN-023	BERKAS	1	RIVANSYAH FADILLAH RISM	P21	MEI	JULI

		BERKAS	2	FEBRIYAN RESTU HARSONO	P21	MEI	JULI
		LKN-035	BERKAS	1 MUHAMAD QASTAFRANA	P21	JULI	NOVEMBER
			BERKAS	FAZA AGRA WISANGGENI	P21	JULI	NOVEMBER
			BERKAS	YEFTA OTNIEL GENTIGA	P21	JULI	NOVEMBER
		LKN-042	BERKAS	1 YUDA PRATAMA	P21	OKTOBER	DESEMBER
7	BNN KABUPATEN GARUT	LKN-009	BERKAS	1 NURLIA FITRIANTY	P21	MARET	JUNI
			BERKAS	2 KRISNA CAHYA ATMAJA	P21	MARET	JUNI
		LKN-051	BERKAS	1 FAISAL AKBAR PANGESTU	SIDIK	DESEMBER	-
				2 TAUFIK NURDIN	SIDIK	DESEMBER	-
8	BNN KAB. KUNINGAN	LKN-020	BERKAS	1 TAUFIK SUDIRMAN alias JEK	P21	MEI	JULI
9	BNN KOTA CIREBON	LKN-010	BERKAS	1 WANTO ALIAS KACER BIN	P21	MARET	APRIL
		LKN-028	BERKAS	1 PETRUS ALDY WINARTO ALS	P21	JUNI	JULI
		LKN-033	BERKAS	1 AUW BUN HAUW ALS AUW	P21	JULI	OKTOBER
10	BNN KAB.BANDUNG BRT	LKN-008	BERKAS	1 HENDRA PEBRIANSYAH	P21	FEBRUARI	APRIL
11	BNN KAB. CIAMIS	LKN-013	BERKAS	1 RYAN ARJUNA	P21	MARET	MEI
12	BNN KAB. SUMEDANG	LKN-001	BERKAS	1 SAEFUL AHMAD	P21	JANUARI	MARET
			BERKAS	1 AGUS KUSNADI	P21	JANUARI	MARET
		LKN-022	BERKAS	1 TAUFIK HIDAYAT	P21	MEI	JULI
		LKN-040	BERKAS	1 ANDRI MAULANA	SIDIK	OKTOBER	-
			BERKAS	1 RANDI PAUZAN	SIDIK	OKTOBER	-
13	BNN KOTA TASIKMALAYA						
14	BNN KOTA CIMAHI						
15	BNN KAB.CIANJUR						

Adapun pada tahun 2021 Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 yang tercapai 54 Berkas dari target 22 Berkas atau sebesar 245%. Tahun 2022 Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 yang tercapai 58 Berkas dari target 25 Berkas atau sebesar 232%.

Sedangkan tahun 2023 pencapaian target sebanyak 53 berkas dari target 25 berkas perkara.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2022, capaian indicator kinerja kegiatan tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah berkas perkara p-21. Hal ini terjadi karena strategi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Barat yaitu:

- Koordinasi yang baik dengan instansi - instansi terkait dalam menunjang kelancaran penyelesaian proses berkas perkara baik itu di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Laboratorium Forensik ataupun lainnya.
- Meningkatkan kemampuan bagi anggota lapangan dan penyidik dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan berbagi pengetahuan / pengalaman.
- Pengajuan anggaran ke BNN RI guna pelaksanaan beberapa kegiatan penyelidikan dan pemberkasan yang tidak bisa masuk dalam anggaran 2023 dikarenakan melebihi target dan anggaran sudah habis.

Sasaran Kegiatan 11

Meningkatnya Pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
2.	Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100	100%

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah:

1. Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan yang meliputi: tidak adanya tahanan kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cidera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cidera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN. Adapun rumus penghitungan indikator kinerja inis sebagai berikut:

- K3T = Nilai Kemanan, Ketertiban dan Keselamatan Tahanan
a = Jumlah tahanan yang kabur
b = Jumlah tahanan yang menderita cidera serius atau kematian akibat perkelahian

c = Jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas
 Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d. 100. Maka:

$$K3T = \left\{ \frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% \right\} \times 100$$

2. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar (secara alamiah/kimiawi) pada barang bukti narkotika dan non-narkotika.

Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahterimakan untuk tahap penuntutan (tahap II). Penghitungan kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah:

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran. Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai $a = 1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$

- KKB = Nilai Keamanan Barang Bukti
 a1 = untuk barang bukti 1;
 a2 = untuk barang bukti 2;
 ay = dst.

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100 Maka:

$$KBB = \left\{ \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \times 100\% \right\} \times 100$$

Selama periode tahun 2021 sampai dengan 2023 Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah 100 dari target 100 atau sebesar 100%. hal ini bisa tercapai karena Terlaksananya kegiatan Penjagaan Tahanan, keamanan pengiriman tersangka, pemeriksaan kesehatan kepada semua tahanan dan Terlaksananya Perawatan pengawasan dalam waktu 1x24 Tahanan selama di tahan di Rutan BNNP Jabar

Dan untuk nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika adalah 100 dari target 100 atau sebesar 100%. Hal ini bisa tercapai karena adanya pengawasan yang ketat pada saat pengawalan dan pengiriman BB Narkotika dalam proses penyidikan dan pengamanan BB dlm proses penimbangan BB Narkotika.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2023, capaian indicator kinerja kegiatan tahun 2023 memiliki nilai yang maksimal yaitu 100, hal ini menunjukkan bahwa SOP dalam penanganan tahanan dan Barang bukti narkotika dan non narkotika berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Sasaran Kegiatan 12

Meningkatnya Pengungkapan Kasus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21. Adapun target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas	1 Berkas	100%

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini adalah Berkas perkara tindak pidana pencucian uang TPPU hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan TPPU yang dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara TPPU hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan yang dilakukan oleh unit BNN Pusat dan Vertikal.

Pada tahun 2022 dan 2023 Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 adalah 1 berkas dari target 1 berkas atau sebesar 100%.

Adapun tahun 2021 Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 adalah 0 berkas dari target 1 berkas atau sebesar 0%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2022, capaian indicator kinerja kegiatan tahun 2022 mengalami kenaikan. Sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 dalam angka yang tetap. Kenaikan pada tahun 2022 ini terjadi karena adanya dukungan dari Direktorat TPPU deputi pemberantasan BNN dalam proses penanganannya. Selain itu juga adanya koordinasi yang baik dengan instansi - instansi terkait dalam menunjang kelancaran penyelesaian proses berkas perkara baik itu di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPATK, pihak Bank, BPN, POLDA dan lembaga keuangan lainnya terkait penelusuran aset.

Sasaran Kegiatan 13

Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja yang Efektif dan Efisien

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut diatas, diimplementasikan melalui indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Barat	87	86,89	99,8%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	14 Kab/Kota	9 Kab/Kota	64%

Definisi operasional

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek Penyerapan Anggaran, Konsistensi, CRO, Efisiensi dan Nilai Efisiensi manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA&KL dan diinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 86,89 dari target 87 atau sebesar 99,8% sedangkan Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target sebanyak 9 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 64,28%

Pada tahun 2022 Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 86,61 dari target 87 atau sebesar 99,55% sedangkan Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target sebanyak 2 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 14,28% dengan rincian indeks Nilai Kinerja anggaran BNN Kab/Kota sebagai berikut:

NO	SATKER	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023
1	BNNP Jawa Barat	87	86,89
2	BNN Kabupaten Bogor	86	87,04
3	BNN Kabupaten Cianjur	87	86,40
4	BNN Kota Bandung	85	86,69
5	BNN Kota Cirebon	88	87,89
6	BNN Kota Cimahi	80	86,37

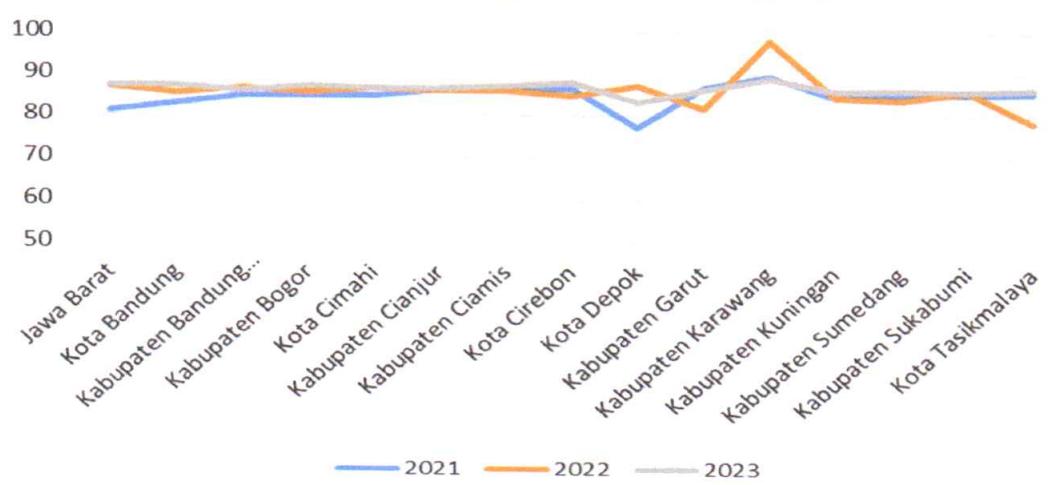
7	BNN Kabupaten Sukabumi	87	85,98
8	BNN Kabupaten Garut	86	86,22
9	BNN Kabupaten Kuningan	86	85,82
10	BNN Kabupaten Ciamis	86	86,88
11	BNN Kota Depok	82	83,06
12	BNN Kabupaten Karawang	92	88,73
13	BNN Kabupaten Bandung Barat	85	85,92
14	BNN Kota Tasikmalaya	86	86,23
15	BNN Kabupaten Sumedang	84	86,16

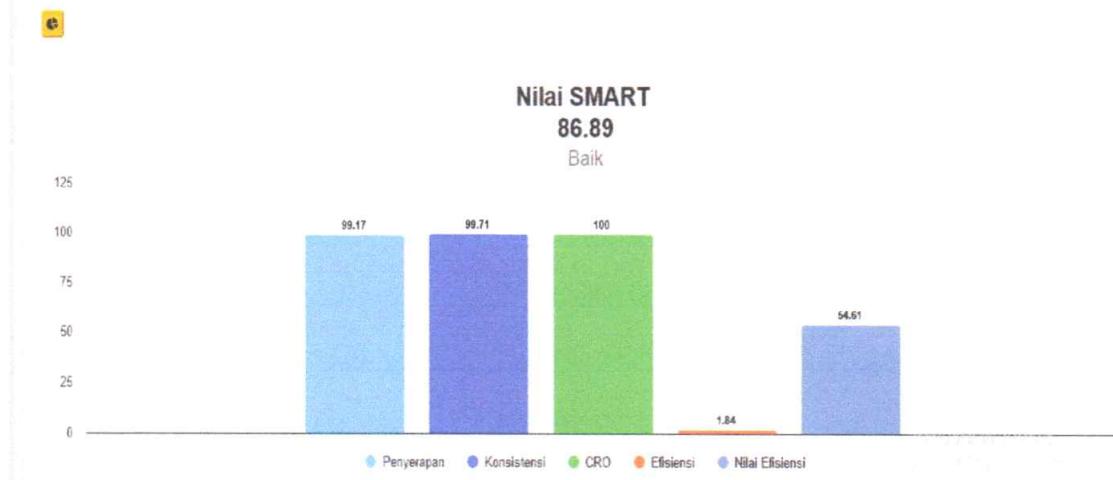
Sedangkan pada tahun 2021 Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 80,68 dari target 90 atau sebesar 89,64% sedangkan Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target sebanyak 0 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 0% dengan rincian indeks Nilai Kinerja anggaran BNN Kab/Kota sebagai berikut:

NO	SATKER	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022
1	BNNP Jawa Barat	90	80,68	87	86,61
2	BNN Kota Bandung	90	82,81	87	85,31
3	BNN Kota Cimahi	90	84,43	87	86,26
4	BNN Kota Cirebon	90	86,23	87	84,69
5	BNN Kota Depok	90	77,14	87	87,01

6	BNN Kota Tasikmalaya	90	85,44	87	78,35
7	BNN Kab. Bandung Barat	90	84,55	87	86,39
8	BNN Kab. Bogor	90	84,67	87	85,46
9	BNN Kab. Ciamis	90	86,02	87	85,83
10	BNN Kab. Cianjur	90	86,08	87	85,81
11	BNN Kab. Garut	90	86,61	87	81,47
12	BNN Kab. Karawang	90	89,5	90	97,83
13	BNN Kab. Kuningan	90	84,31	87	84,22
14	BNN Kab. Sukabumi	90	85,25	87	85,69
15	BNN Kab. Sumedang	90	84,87	87	83,73

Nilai Kinerja anggaran BNN Kab/Kota





Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022, nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Jawa Barat tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup baik. Kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Adanya peningkatan pemahaman pegawai di BNN Provinsi Jawa Barat terkait indikator dari Nilai Kinerja Anggaran.
2. Adanya koordinasi dengan Pembina fungsi, Kemenkeu dalam hal ini Direktur Jendral Perbendaharaan Kanwil Jawa Barat dan KPPN Bandung I sehingga langkah2 untuk mencapai target nilai kinerja anggaran dapat ditingkatkan.
3. Adanya sinergitas dari Para pegawai dilingkungan BNN Provinsi Jawa Barat sehingga nilai kinerja anggaran mengalami peningkatan.

Sasaran Kegiatan 13

Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Barat	92	98,46	107%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	14 Kab/Kota	13 Kab/kota	92%

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2022 memiliki 8 indikator yang terfokus pada 3 aspek yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

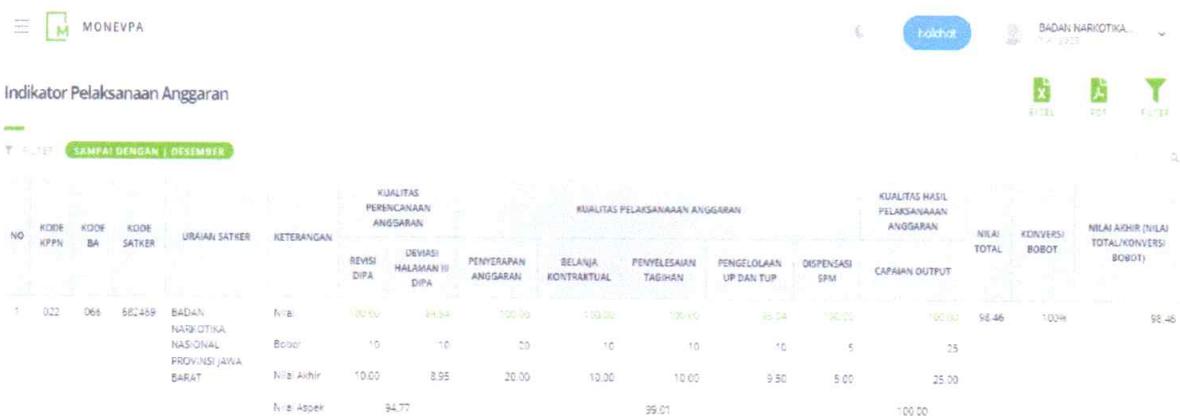
Formula perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$Nilai IKPA = \sum_{n=1}^8 (Nilai Indikator_n \times Bobot Indikator_n) : Konversi Bobot$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

Pada tahun 2023 nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 98,46 dari target 92 atau sebesar 107% seperti yang terlihat dalam gambar dibawah ini:



NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN II DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAHIBAH	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT						
1	022	066	562489	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT	Nihil	100,00	89,54	100,00	100,00	100,00	100,00	85,04	100,00	100,00	98,46	100%	98,46		
					Bolos	10	10	00	10	10	10	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10,00	8,55	20,00	10,00	10,00	9,50	5,00	25,00						
					Nilai Aspek	94,77			99,01					100,00					

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Sedangkan Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target sebanyak 13 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 92,86% dengan rincian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kab/Kota adalah sebagai berikut:

NO	SATKER	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023
1	BNNP Jawa Barat	92	98,46
2	BNN Kabupaten Bogor	92	81,44
3	BNN Kabupaten Cianjur	92	100
4	BNN Kota Bandung	92	98
5	BNN Kota Cirebon	92	100
6	BNN Kota Cimahi	92	99,48
7	BNN Kabupaten Sukabumi	92	100

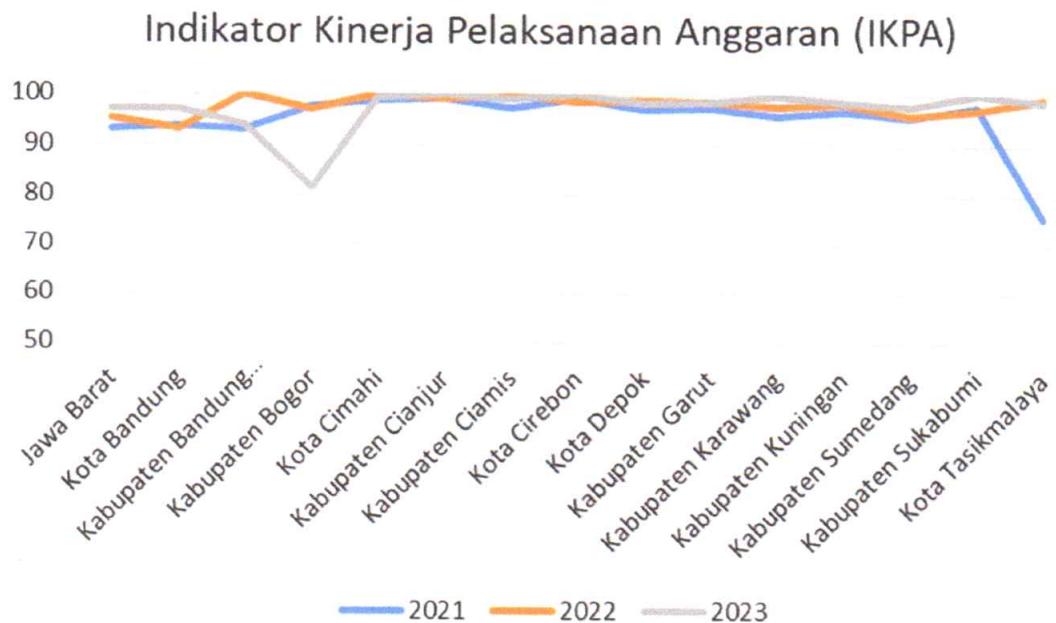
8	BNN Kabupaten Garut	92	98,83
9	BNN Kabupaten Kuningan	92	98,34
10	BNN Kabupaten Ciamis	92	98,96
11	BNN Kota Depok	92	98,19
12	BNN Kabupaten Karawang	92	99,99
13	BNN Kabupaten Bandung Barat	92	94,01
14	BNN Kota Tasikmalaya	92	98,4
15	BNN Kabupaten Sumedang	92	97,57

Tahun 2021 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 92,93 dari target 94 atau sebesar 99% sedangkan Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target sebanyak 11 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 79%

Tahun 2021 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Barat tercapai 95,14 dari target 95 atau sebesar 99,85% sedangkan Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target sebanyak 13 kab/kota dari target sebanyak 14 Kab/Kota atau sebesar 92,85% dengan rincian indeks Nilai Kinerja anggaran BNN Kab/Kota sebagai berikut:

NO	SATKER	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022
1	BNNP Jawa Barat	94	92,93	95	95,14
2	BNN Kota Bandung	94	93,58	95	93,16

3	BNN Kota Cimahi	94	98,93	95	99,97
4	BNN Kota Cirebon	94	99,08	95	98,37
5	BNN Kota Depok	94	96,83	95	98,64
6	BNN Kota Tasikmalaya	94	75,54	95	99,22
7	BNN Kab. Bandung Barat	94	93,02	95	99,99
8	BNN Kab. Bogor	94	97,65	95	96,95
9	BNN Kab. Ciamis	94	97,34	95	99,88
10	BNN Kab. Cianjur	94	98,95	95	99,10
11	BNN Kab. Garut	94	97,14	95	98,52
12	BNN Kab. Karawang	94	95,88	95	97,72
13	BNN Kab. Kuningan	94	96,65	95	98,31
14	BNN Kab. Sukabumi	94	97,51	95	97,04
15	BNN Kab. Sumedang	94	95,54	95	95,76



Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Barat tahun 2023 mengalami kenaikan. Keberhasilan tercapainya target kinerja tersebut disebabkan oleh:

1. Adanya peningkatan pemahaman pegawai di BNN Provinsi Jawa Barat terkait 8 indikator dari 3 aspek dalam pengukuran IKPA.
2. Adanya sosialisasi terkait peningkatan IKPA dari kementerian terkait yaitu Kemenkeu dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan Kanwil Jawa Barat dan KPPN Bandung I.
3. Adanya sinergitas dari Para pegawai di lingkungan BNN Provinsi Jawa Barat mulai dari bagian umum dan bagian teknis di BNN Provinsi jawa barat sehingga nilai IKPA mengalami peningkatan dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Sasaran Kegiatan 15

Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	75	81,56	108%

Zona Integritas merupakan sebutan yang diberikan kepada kementerian, lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat dan komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2023 BNNP Jawa Barat mendapatkan target kinerja pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen pelayanan publik yang tefektif, efisien, unggul transparan dan akuntabel dengan target angka 75 indeks dan capaian realisasi berdasarkan penilaian internal mencapai 81,56 indeks.

Hal ini selaras dengan indeks kepercayaan masyarakat terhadap BNN Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar 87,3 dengan kategori "Baik" dan indeks berdasarkan pengalaman masyarakat yang pernah menerima layanan dari BNNP di wilayah Indonesia dalam indkes kepercayaan "Sangat Baik" (Buku Hasil Pengukuran Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap BNN tahun 2023, Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN)

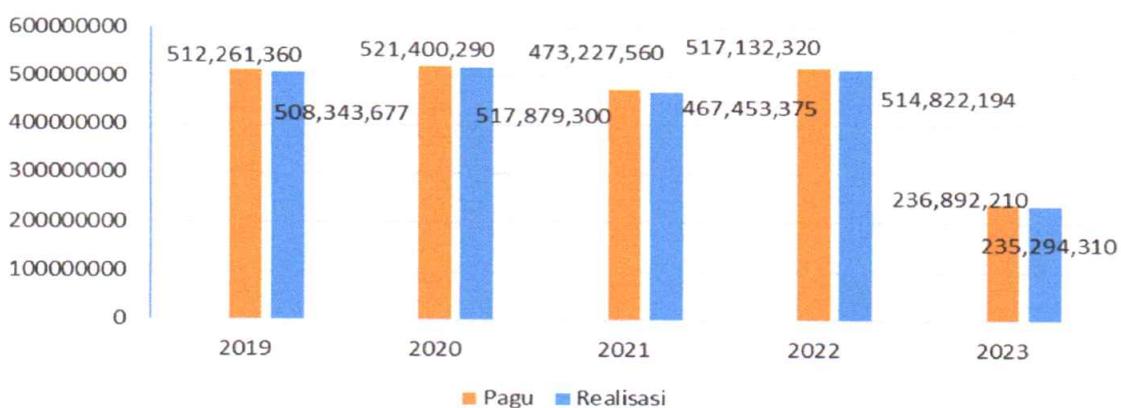
B. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat beserta BNNK jajaran mendapatkan alokasi anggaran (sesuai Pagu Anggaran di Perjanjian Kinerja BNNP Barat) sebesar 54.977.592.000,- (Empat puluh lima milyar lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan realisasi anggaran Rp.54.625.103.441 (Lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh lima juta seratus tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).

TAHUN	PAGU	REALISASI	%	SISA
2019	51,226,136,000	50,834,367,685	99,24%	391.768.315
2020	52,140,029,000	51,787,930,000	99,32%	352.098.373
2021	47,322,756,000	46,745,337,461	98,78%	577.418.539
2022	51,713,232,000	51,482,219,435	99,55%	230.912.565
2023	23,689,221,000	23,529,430,955	99,33%	159,790,045

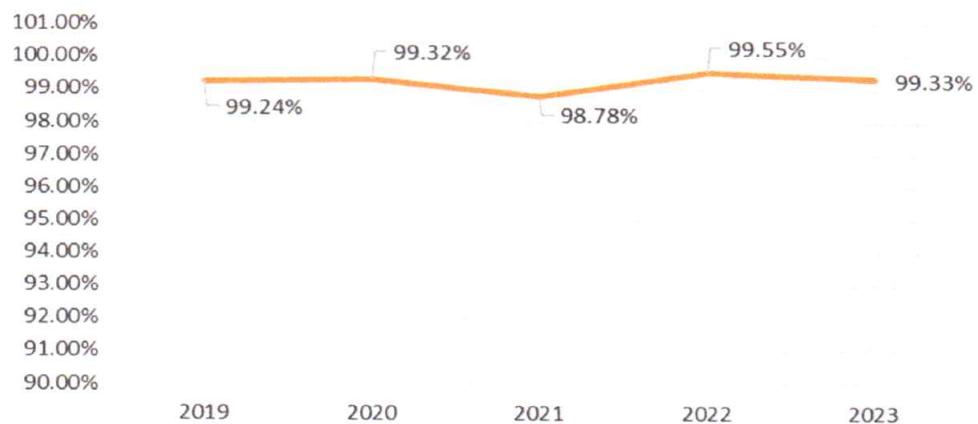
Sejak tahun 2019 hingga 2023 realisasi anggaran di BNNP Jawa Barat dan BNNK Jajaran selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya seperti terlihat dalam grafik di bawah ini:

**PAGU DAN REALISASI BNNP JAWA BARAT DAN BNNK
JAJARAN PERIODE 2019-2023**



Jika dilihat dari sudut pandang realisasi secara persentase sejak tahun 2019 hingga 2023 BNNP Jawa Barat dan BNNK Jajaran selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya namun mengalami sedikit penurunan seperti terlihat dalam grafik di bawah ini:

TREN REALISASI BNNP JAWA BARAT DAN BNNK JAJARAN PERIODE 2019-2023



Selain itu capaian 3 tahun terakhir selalu mencapai di atas 98% melebihi target yang ditetapkan oleh BNN RI dan Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi tantangan kedepannya dikarenakan BNNP Jawa Barat harus bisa mempertahankan capaian tersebut.

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	1.427.000.000	2.047.170.000	2.046.900.000	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	5 Kabupaten /Kota	5 Kabupaten /Kota
2	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	1.510.000.000	1.673.121.000	1.664.561.000	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kabupaten /Kota	14 Kabupaten /Kota
3	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	3.284.412.000	4.102.126.000	4.093.194.500	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	14 Kabupaten /Kota	14 Kabupaten /Kota

4	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	165.415.000	149.415.000	247.835.000	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan
					Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan	3,00	3,10
5	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	373.877.000	807.322.000	801.366.650	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	150 Orang	173 Orang
					Jumlah petugas Rehabilitasi yang bersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	10 Orang
6	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	268.796.000	3.800.500.000	3.726.125.506	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	8 Lembaga	8 Lembaga
					Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	30 Unit	35 Unit
7	Kegiatan Pasca Rehabilitasi Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkoba	375.099.000	352.874.000	345.287.740	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Barat	3,273	3,42
8	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	210.000.000	322.285.000	322.285.000	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan

NO	OUTPUT	PAGU	PAGU ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
9	Kegiatan Penyelidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	1.280.000.000	1.567.540.000	1.566.938.000	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	25 Berkas	53 Berkas
10	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	452.550.000	491.810.000	474.805.000	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100
					Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100
11	Kegiatan Penyidikan tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	210.000.000	182.220.000	182.220.000	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas	1 Berkas
12	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	15.029.908.000	16.330.194.000	16.113.692.143	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Barat	92	98,46
					Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	14 BNN Kabupaten /Kota	13 BNN Kabupaten /Kota
13	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber	392.334.000	614.918.000	607.764.019			

	Daya Manusia						
14	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	473.778.000	423.166.000	386.650.706	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Barat Jumlah BNN Kabupaten /Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	87	86,89
15	Kegiatan Penyelenggara an Ketatausahaan , Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	19.788.414.000	21.681.081.000	21.618.764.697		14 BNN Kabupaten /Kota	9 BNN Kabupaten /Kota
16	Kegiatan Penyelenggara an Kehumasan dan Keprotokolan	315.000.000	431.850.000	426.713.480			
JUMLAH		45.556.583.000	54.977.592.000	54.625.103.441			

BAB IV

PENUTUP

BNN Provinsi Jawa Barat secara umum telah melaksanakan target kinerja selama tahun 2023 dan disampaikan pertanggungjawabannya melalui Laporan Kinerja BNN Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Barat dan Kepala BNN RI yang berisi 15 (lima belas) Sasaran Kegiatan dan 21 (Dua puluh satu) Indikator Kinerja, tingkat capaiannya dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu:
 - a. Capaian *melebihi target* kinerja yang ditetapkan sebanyak 8 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	212%
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	116%
3	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	109%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	104%

5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	104%
6	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	103%
7	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Barat	107%
8	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Mencapai zona integritas BNN berdasarkan penilaian interna;	108%

b. Capaian **sesuai target** kinerja yang ditetapkan sebanyak 10 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	100%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	100%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	100%

4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	100%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	100%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	100%
7	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	100%
8	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100%
9	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100%
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Barat	100%

c. Capaian yang kurang/dibawah dari target kinerja yang ditetapkan sebanyak 3 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	64%
2	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Barat	99,8%
3	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	92%

2. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja:

- Perubahan target kinerja sebagai kebijakan dari pembina fungsi akan diikuti dengan revisi Perjanjian Kinerja.
- Adanya kesempatan yang luas untuk mengikuti pengembangan kapasitas berupa pendidikan pelatihan/bimtek bagi seluruh personil BNN Provinsi Jawa Barat.
- Optimalisasi koordinasi dan Kerjasama ke seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas.
- Peningkatan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.
- Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

LAMPIRAN

in*Bersih*
Indonesia
Narkoba

